

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN MELALUI
PENGOLAHAN IKAN OLEH DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DI KECAMATAN BANDA SAKTI KOTA
LHOKSEUMAWE PROVINSI ACEH**

MAULIA YULINA

*Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat,
Fakultas Politik Pemerintahan*

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor-Jawa Barat, Indonesia

Email: mauliayulina31@gmail.com

ABSTRACT

The author focuses on the problem of empowering fishing communities in fish processing to improve community welfare in the Banda Sakti District. **Objectives** : The purpose of this study is to determine the process of empowering fishing communities in the fish processing process in improving the welfare of their families, what are the obstacles, and how the Lhokseumawe City government is trying to overcome these obstacles. **Methods** : This research is a qualitative research with descriptive method and inductive approach using empowerment theory by Mardikanto and Soebianto about empowerment covering 4 dimensions, namely human development, business development, environmental development and institutional development. Data analysis techniques through interviews, documentation, and observation. **Findings** : The findings obtained by the researcher are that the empowerment of fishing communities in processing fish in Banda Sakti District is good, but in practice there are still obstacles such as the lack of awareness of the fishing community to carry out fish processing activities for sale or market. **Conclusion** : Empowerment of fishing communities in processing fish production in Banda Sakti District, Lhokseumawe City is currently running well, but its implementation is not

optimal due to various obstacles such as water conditions due to weather factors, unfulfilled facilities and infrastructure for all fishermen and also the lack of interest in increasing the production of processed products. The Lhokseumawe City government continues to strive for these obstacles by coordinating through the sub-district government to overcome them.

Keywords: Empowerment, Fishermen, Fish Processing

ABSTRAK

Penulis berfokus pada permasalahan pemberdayaan masyarakat nelayan dalam pengolahan ikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Banda Sakti. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses pemberdayaan masyarakat nelayan dalam proses pengolahan ikan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya, apa hambatan, dan bagaimana upaya pemerintah Kota Lhokseumawe dalam mengatasi hambatan tersebut. **Metode:** Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif dengan menggunakan teori pemberdayaan oleh Mardikanto dan Soebianto tentang pemberdayaan meliputi 4 dimensi yaitu bina manusia, bina usaha, bina lingkungan dan bina kelembagaan. Teknik analisis data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh peneliti yaitu pemberdayaan masyarakat nelayan dalam melakukan pengolahan ikan di Kecamatan Banda Sakti sudah baik namun dalam pelaksanaannya masih terdapat terkendala seperti kurangnya kesadaran masyarakat nelayan untuk melakukan kegiatan pengolahan ikan untuk dijual atau dipasarkan. **Kesimpulan:** Pemberdayaan masyarakat nelayan dalam mengolah produksi ikan di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe pada saat ini tergolong sudah berjalan baik, namun dalam pelaksanaannya belum optimal karena adanya berbagai hambatan seperti kondisi perairan akibat faktor cuaca, belum terpenuhinya sarana dan prasarana kepada seluruh nelayan dan juga kurangnya minat untuk peningkatan produksi hasil olahan. Hambatan tersebut terus diupayakan oleh pemerintah Kota Lhokseumawe dengan berkoordinasi melalui pemerintah kecamatan untuk mengatasinya.

Kata Kunci : Pemberdayaan, Nelayan, Pengolahan Ikan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) yang tersebar di seluruh dunia, dengan garis pantai kurang lebih 81 ribu km dan 17.506 pulau.¹ Negara ini terdiri dari 5 gugus pulau besar dan 30 gugus pulau kecil, 8.653 pulau tanpa nama dan 9.845 pulau belum terbukti. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari daratan dan perairan, yang sebahagian besar wilayah Indonesia adalah laut, seluas 5,81 juta km atau 71% dari total wilayah Indonesia². Memiliki laut territorial yang luas tentunya sangat menguntungkan bagi Indonesia karena potensi alamnya yang sangat kaya. Oleh karena itu, Indonesia memang layak dijuluki sebagai negara zamrud khatulistiwa.

Saat ini, perjalanan di negara Indonesia masih menghadapi sedikit persoalan kesejahteraan sosial, umumnya dalam hal kemiskinan. Respon terhadap permasalahan sosial yang kompleks dapat ditempuh melalui pemberdayaan yang mulai dikhawatirkan oleh banyak pemangku kepentingan. Instansi pemerintah (pusat dan daerah) telah membentuk beragam lembaga pemberdayaan, tapi pada kenyataannya program tergolong pemberdayaan yang cenderung *charity* dan *top down* tergolong menginjak angka yang tinggi. Akibatnya, jumlah warga negara yang tidak mampu bersaing dengan rasa malas dan ketergantungan terhadap orang lain semakin meningkat, sehingga sulit untuk mewujudkan kemandirian dan kemakmuran daerah dikalangan masyarakat.

Proses pemberdayaan masyarakat faktanya merupakan elemen dari empat fungsi pemerintahan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut sudah terbagi menjadi empat bagian fungsi pemerintahan, yaitu pemberdayaan (*empowering*), pembangunan (*development*), pengaturan (*regulation*) dan pelayanan (*public service*). Adapun fungsi yang dilakukan oleh pemerintah dalam kurun waktu tertentu akan menggambarkan kinerja pemerintah itu sendiri. Jika pemerintahan berikutnya dapat meneruskan kewajibannya dengan maksimal, maka tugas pokok dapat dijalankan dengan sempurna, contohnya pelayanan menghasilkan keadilan, pemberdayaan

¹ Rahardjo Boy Sidharta, *Budaya Bahari dari Nusantara Menuju Mataram Modern*, (Yogyakarta:Gosyen Publishing,2015)

² <https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya>

menghasilkan kemandirian, dan pembangunan menghasilkan kemakmuran.

Pelaksanaan otonomi daerah menghadirkan peluang yang sebesar-besarnya kepada pemimpin yang berada di daerah untuk mengoptimalkan pengolahan dan pemanfaatan potensi alam yang tersedia di daerahnya, terutama potensi hasil kekayaan laut yang jarang mendapat perhatian dan kurang dilirik oleh pemerintah. Menyikapi permasalahan tersebut, maka disusunlah Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tentang Pengolahan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil untuk dikelola dan dimanfaatkan, termasuk pemanfaatan sumber daya perairan.

Provinsi Aceh merupakan satu diantara banyaknya provinsi yang kaya akan potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat banyak manfaatnya. Provinsi Aceh juga memiliki luas daratan 57.365,71 km² dan luas perairan yang mencapai 295.376 km² terdiri dari perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan luas 238.811 km² dan perairan teritorial dan kepulauan sebesar 56.565 km², dengan panjang garis panjang yang membentang mencapai angka 2.666,4 km. Hal lainnya, Provinsi Aceh juga memiliki 198 pulau yang memiliki status geoekonomi dan geopolitik tergolong strategis.

Berbatasan dengan Selat Malaka di utara dan timur. Sumatera Utara berda di selatan, dan Samudera Hindia di barat. Posisi Provinsi Aceh sangat strategis karena terletak di ujung barat Indonesia dan merupakan pintu gerbang (*gate*) bisnis dan perdagangan Internasional, khususnya Asia Tenggara dan Australia.

Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa Aceh memiliki banyak kekayaan kelautan dan perikanan, termasuk hasil alam yang dapat diperbaharui dan hasil alam yang tidak dapat diperbaharui. Jika dimanfaatkan secara terencana dan optimal, sektor perikanan dan kelautan merupakan sektor unggulan dan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan Aceh yang lebih baik di masa mendatang. Pemanfaatan potensi laut ini dianggap sebagai kekuatan ekonomi dan politik yang dapat diandalkan yang dapat meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Aceh dan mencapai kemakmuran yang didambakan.

Para nelayan merupakan bagian dari penduduk di Indonesia yang melakukan aktifitas mengelola potensi hasil kekayaan perikanan yang tersedia untuk bertahan hidup. Dalam kehidupannya, seorang nelayan sangat identik dengan wilayah atau daerah pesisir. Kemungkinan alam

masyarakat nelayan untuk berbicara tentang aspek pesisir juga erat kaitannya dengan memancing dan perikanan.

Kota Lhoksemawe merupakan kota kecil hasil dari pemekaran Kabupaten Aceh Utara yang berada di Provinsi Aceh³. Letaknya berada di posisi pertengahan yang merupakan jalur timur sumatera sehingga kota ini merupakan salah satu jalur pendistribusian dan jalur perdagangan yang sangat komersial bagi kawasan Provinsi Aceh. Hal lainnya, Lhokseumawe merupakan jalur strategis bagi para wisatawan yang ingin melewati jalur darat di tanah Rencong ini. Lhokseumawe dengan luas wilayah 181,06 km². Sejak berdiri sendiri pada tahun 2001, hingga saat ini Kota Metropolitan ini terbagi atas 4 kecamatan, 9 pemukiman, 68 gampong/desa, dan 266 dusun⁴.

Sektor kelautan dan perikanan memegang peranan yang tergolong sangat penting, dimana banyak warga atau masyarakat Kota Lhokseumawe terutama masyarakat wilayah pesisir menggantungkan keberlangsungan hidupnya dari kedua sektor ini. Sebahagian besar berprofesi sebagai nelayan dan pemelihara tambak ikan. Selain itu, untuk hasil perikanan laut yang dihasilkan diantaranya adalah ikan tongkol, cumi, ikan kembung, ikan tenggiri, ikan kakap, ikan teri, ikan tuna, belanak, udang, cumi-cumi, ikan kerapu, ikan manyung, kerong-kerong, ikan bawal, dan jenis ikan lainnya.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Di Kota Lhokseumawe setidaknya ada 22 unit pengolahan ikan di antaranya Kawasan Banda Sakti, Pusong Baru dan di Kawasan Ujong Blang. Dilihat dari gaya hidup masyarakat di Lhokseumawe sebagian besar adalah nelayan. Namun, pemerintah daerah belum sepenuhnya memanfaatkan potensi ini. Oleh karena itu, Dinas Perikanan harus memberikan dukungan, pendampingan dan nasehat kepada para nelayan dalam rangka peningkatan produksi ikan di Kota Lhokseumawe. Hal ini tentunya sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin berkembang. Kota Lhokseumawe merupakan salah satu komersial dan budidaya ikan.

Pemberdayaan diperlukan untuk membuat masyarakat di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dapat menghasilkan produksi ikan tidak hanya berbahan mentah saja melainkan dapat diolah menjadi

³ UU Nomor 2 Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001

⁴ Kota Lhokseumawe dalam Angka 2021

makanan yang menjadi nilai tambah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, ada 3 penelitian yang dijadikan pedoman dalam penyusunan penelitian ini. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rahmatulliza yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Pelabuhan Kuala Stabas Kecamatan Pesisir Tengah Krui Kabupaten Pesisir Barat. Hasil dari penelitian ini adalah dalam pemberdayaan, Pemerintah Di Desa Kuala Stabas sudah dikatakan optimal dalam menghadapi kondisi lapangan, karena apa yang telah mereka dilakukan sangat membuahkan hasil yang berguna bagi khalayak ramai, dengan adanya pemberian untuk mengingatkan hal tersebut akan kemampuan para nelayan terhadap pembuatan proposal dan menemukan hasil yang sesuai dari apa yang diusahakan, seperti sumbangsih dana dari pemda. Contoh hal yang diminta 10 unit perahu dan yang cair hanya 50%.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh A. Hamzah dengan judul Pemberdayaan Ekonomi Nelayan oleh PT. Karya Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa di Desa Tanjung Pasir Kabupaten Tangerang. Penelitian ini berisi tentang sebuah program pemberdayaan pasti memiliki tujuan pemberdayaan, adapun tujuan pemberdayaan ekonomi di Tanjung Pasir pada umumnya program pemberdayaan nelayan Tanjung Pasir adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat atau pemetik manfaat utama dalam peningkatan kemampuan serta ekonomi.

Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Debby Tri Julianty Nainggolan dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Nelayan melalui Pengolahan Ikan Laut di Kecamatan Kampung Melayu oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. Hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pengolahan ikan laut oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bengkulu, secara umum belum berjalan secara maksimal. Masih terdapat banyak faktor penghambat diantaranya nilai SDM yang rendah dan kurangnya modal dari pemerintah. Adapun hal yang seharusnya dilakukan adalah melakukan berbagai pelatihan untuk mengasah kemampuan SDM, membantu proses pemasaran dan bantuan sarana dan prasarana yang menunjang dalam produksi.

1.4 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu, dimana objek yang diteliti oleh penulis yaitu pengolahan makanan dengan berbahan dasar ikan sehingga memiliki nilai jual serta perbedaan dari segi teori yang penulis gunakan. Berbeda dengan penelitian Rahmatulliza, A. Hamza, maupun Debby Tri. Selain itu, pengolahan ikan yang sebahagian besar dilakukan oleh masyarakat nelayan ini diharapkan mampu menunjang kesejahteraan kehidupan para keluarga nelayan dan tidak ketergantungan lagi kepada pihak lain serta menambah keterampilan dalam proses pengolahan ikan. Dalam hal ini diharapkan para nelayan tidak hanya berpatokan dalam menjual ikan dalam bentuk mentahan saja.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat nelayan dalam pengolahan ikan di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Hal ini bermaksud untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat nelayan dengan melakukan usaha penjualan makanan dengan berbahan dasar ikan di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh.

II. METODE

Lingkup penelitian yang akan penulis kembangkan sesuai dengan keilmuan pada Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat. Penulis hanya membatasi lingkup penelitian pada dimensi bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan sesuai dengan konsep pemberdayaan dari Totok Mardikianto dan Soebianto dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan wawancara terhadap 6 orang informan utama. Dimana informan ini terdiri dari Kepala Dinas Kelautan Perikanan Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe, Camat Banda Sakti, geuchik dari 3 gampong, Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat, nelayan dan masyarakat pesisir pantai.

Dengan menggunakan teknik analisis data reduksi, penyajian dan verifikasi dari keseluruhan data. Selanjutnya dilakukan triangulasi data untuk mencapai hasil dan kebenaran yang tepat sesuai harapan penulis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa dokumentasi dan wawancara terkait pemberdayaan masyarakat nelayan dalam pengolahan ikan di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, hasil yang penulis dapatkan berdasarkan teori Mardikanto dan Soebianto terkait pemberdayaan masyarakat melalui 4 dimensi, yaitu :

3.1 Bina Manusia

Bina manusia adalah kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan atau cara berpikir masyarakat nelayan di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Pelatihan dan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan atau keterampilan serta cara berpikir sehingga masyarakat nelayan bisa mengetahui dan mampu untuk mengelola hasil tangkapan supaya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarganya.

Dalam pelaksanaannya pemerintah Kota Lhokseumawe bekerja sama dengan pihak ketiga telah menyelenggarakan beberapa pelatihan dan sosialisasi keterampilan terkait pengolahan ikan kepada para masyarakat nelayan.

3.2 Bina Usaha

Bina usaha menjadi suatu upaya penting dalam setiap kegiatan pemberdayaan. Perannya menjadi aspek penunjang dalam suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sedang berlangsung.

Dalam hal ini pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Dinas Kelautan Perikanan Pertanian dan Pangan telah membantu menyalurkan alat bantu penangkapan kepada beberapa nelayan. Dengan pemberian bantuan berupa alat bantu penangkapan seperti kapal, jarring insang, *cold box* dan alat bantu pengolahan seperti *frezzer*, *vacuum sealer* sebagai sarana untuk mempermudah para pelaku usaha dalam melakukan proses penangkapan ikan serta mengolahnya.

3.3 Bina Lingkungan

Bina Lingkungan, merupakan unsur yang berkaitan dan sumber daya manusia dan lingkungan hidup. Dimana manusia harus secara sadar berpartisipasi dalam proses penjagaan lingkungannya. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kota Lhokseumawe dengan memberikan

sosialisasi atau penyuluhan terkait kesadaran untuk menjaga lingkungan pesisir pantai.

Dengan bantuan dari pihak Babinsa Gampong dan Panglima Laot sebagai utusan pihak Dinas untuk melakukan program pembersihan wilayah pesisir pantai dengan berlandaskan kesadaran diri untuk tetap terjaganya kelestarian pantai serta menciptakan lingkungan bersih dan sehat bagi masyarakat di area pesisir pantai.

3.4 Bina Kelembagaan

Bina Kelembagaan, pada dasarnya kelembagaan merupakan bentuk relasi sosial hubungan antara masyarakat. Indikator bina kelembagaan yaitu kebijakan dan peraturan yang berpihak kepada pemberdayaan kelompok masyarakat nelayan dan keterlibatan masyarakat dalam pemberdayaan suatu kegiatan usaha tersebut.

Dengan aspek bina kelembagaan bagi masyarakat nelayan dan Pemerintah Gampong membuat kebijakan dan peraturan yang dirumuskan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari pemberdayaan masyarakat nelayan itu sendiri.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Analisis pemberdayaan masyarakat nelayan dalam melakukan pengolahan ikan di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe peroleh dengan menggunakan 4 dimensi pemberdayaan masyarakat yang jika seluruh dimensi tersebut berjalan secara optimal akan menciptakan kesejahteraan masyarakat nelayan yang cukup baik. Penulis menemukan temuan penting dimana apabila kelompok nelayan berkemauan lebih tinggi dalam melakukan pengolahan dengan bahan dasar ikan maka tingkat pendapatan mereka bisa dikatakan di atas rata-rata angka kecukupan.

Dalam hal ini kegiatan usaha pengolahan berbahan dasar ikan juga cukup mendapat sorotan dari pemerintah setempat. Dengan adanya bantuan freezer, coolbox, dan berbagai jenis alat bantu pengolahan lainnya sebagai roda penggerak terciptanya usaha kecil dari pengolahan ikan di Kota Lhokseumawe.

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat nelayan dalam pengolahan ikan ini yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat sendiri dalam melakukan proses

pengolahan ikan sehingga jumlah produksi makanan olahan yang siap untuk dijual masih tergolong minim dan sangat sedikit.

IV. KESIMPULAN

Dalam penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat nelayan dalam mengolah produksi ikan di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe oleh Dinas Kelautan dan Perikanan pada saat ini tergolong sudah berjalan dengan baik, walaupun belum berjalan dengan optimal karena terdapat beberapa hambatan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan secara apa adanya dan menggunakan modal yang terbatas dari bantuan keluarga penulis.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat nelayan dalam pengolahan untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukkann kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe khususnya Dinas Kelautan Perikanan Pertanian dan Pangan yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, seluruh keluarga besar Abdullah Ajie yang senantiasa memberikan dukungan saran masukan dan semangat kepada penulis dalam menjalani Pendidikan dan seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan kegiatan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Anwas, Oos M. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta

Kusnadi. 2009. *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Pusat Penelitian Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Jember.

Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Mulyadi. 2007. *Ekonomi Kelautan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Murniyati dan Sunarman. 2004. *Pendinginan dan Pengawetan Ikan*. Yogyakarta:Kasinus.

Sastrawidjaya, dkk.2002. *Nelayan Nusantara*. Jakarta:Pusat Riset Pengolahan Produk Sosial Ekonomi dan Perikanan.

Sidharta, Rahardjo Boy. 2015. *Budaya Bahari dari Nusantara Menuju Mataram Moderen*. Gosyen Publishing, Yogyakarta.

Simangunsong, Fernandes. 2017. *Metodelogi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.

Subejo dan Narimo. 2004. *Metodologi Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat. Bahan Kuliah : Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan*. Yogyakarta:UGM

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta

Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung:PT Refika Aditama.

Sujarweni, V.Wiratna. 2019. *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta:Pustaka Baru Press.

Sumardjo, 1999, *Transformasi Model Penyuluhan Pertanian Menuju Pemberdayaan Kemandirian Petani [Disertasi]*, Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Sumaryadi, I.Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta:Citra Utama.

Sumodiningrat, Gunawan. 2003. *Pemberdayaan Sosial*. Jakarta:Teruna Grafika.

Suyono dan Hariyanto. 2014. *Belajar dan Pembelajaran : Teori dan Konsep Dasar*. Bandung:Remaja Rosdakarya.

Widodo, Tri. 2006. *Perencanaan Pembangunan : Aplikasi Komputer*. Yogyakarta:UPP STIM YKPN.

Lhokseumawe Dalam Angka 2021 (diakses pada tanggal 24 Agustus 2021)

Susanto, E dan Fahmi AS. 2012. *Senyawa Fungsi dari Ikan: Aplikasinya dalam Pangan*. *Jurnal Aplikasi Pangan Teknologi* 1(4):95-102